

Research Article

Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Model Ekonomi Syariah

Kheqal Fitradinata¹, Muhammad Fadhli², Riyandi Fatur Nugraha³, Zulfikar Hasan⁴

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; kheqalfitradinata@gmail.com 
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; mpadlibks@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; riyandifatur@gmail.com
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; zulfikarhasan61@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by **Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 11, 2024
Accepted : May 21, 2024

Revised : April 17, 2024
Available online : June 09, 2024

How to Cite: Kheqal Fitradinata, Muhammad Fadhli, Riyandi Fatur Nugraha, & Zulfikar Hasan. (2024). Poverty Alleviation Strategy Through the Sharia Economic Model. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 2(2), 50-63. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i2.20>

Poverty Alleviation Strategy Through the Sharia Economic Model

Abstract. Poverty is one of the biggest challenges in developing countries like Indonesia. Although various efforts have been made, the results of poverty reduction have not been sufficient, so a more comprehensive and sustainable approach is needed. The application of the sharia economic model, based on Islamic principles such as justice, balance and sustainability, offers a holistic and fair solution to overcoming poverty. Sharia economics emphasizes the equal distribution of wealth through zakat, alms, infaq and waqf mechanisms which are significant in redistributing wealth and empowering the community's economy. The research method used is qualitative by reviewing documents and related

literature. Data analysis was carried out interactively to understand primary and secondary data sources. From the results of the analysis, it appears that the implementation of sharia economic principles has made a positive contribution in reducing poverty rates in Indonesia, although challenges in poverty alleviation still remain. Therefore, commitment and cooperation between the government, the private sector and the wider community is needed to continue to develop and implement strategies that are more effective in overcoming the problem of poverty as a whole. The conclusion of this study is that the application of the sharia economic model has great potential in alleviating poverty in Indonesia.

Keywords: Poverty Alleviation, Sharia Economic Model

Abstrak. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar di negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil pengurangan kemiskinan belum memadai, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penerapan model ekonomi syariah, berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, menawarkan solusi holistik dan adil untuk mengatasi kemiskinan. Ekonomi syariah menekankan distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme zakat, sedekah, infaq, dan wakaf yang signifikan dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan kajian dokumen dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara interaktif untuk memahami sumber data primer dan sekunder. Dari hasil analisis, terlihat bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah telah memberikan kontribusi positif dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, meskipun tantangan dalam pengentasan kemiskinan masih tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas untuk terus mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa penerapan model ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci : Pengentasan Kemiskinan, Model Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, terutama di negara-negara berkembang¹. Di Indonesia, meskipun telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, hasilnya masih belum sepenuhnya memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang potensial adalah melalui penerapan model ekonomi syaria'h. Ekonomi syaria'h, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, menawarkan solusi yang holistik dan adil dalam menangani masalah kemiskinan.

Ekonomi syaria'h didasarkan pada beberapa prinsip dasar seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Prinsip keadilan menekankan distribusi kekayaan yang merata dan adil di antara semua anggota masyarakat, sementara keseimbangan mendorong adanya harmoni antara kebutuhan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip keberlanjutan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan dengan bijaksana dan dipertahankan untuk generasi mendatang. Dalam

¹ Diana Syahputri, Sofia Lubis, And Bunga Anggraini. "Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Di Negara-Negara Berkembang." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3.1 (2024): 93-103.

konteks pengentasan kemiskinan, ekonomi syaria'ah mengedepankan mekanisme seperti zakat, sedekah, infaq, dan wakaf yang memiliki peran signifikan dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi syaria'ah, berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang efektif. Zakat tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi individu yang kurang mampu tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, sedekah dan infaq juga memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan jaringan dukungan yang kuat di antara anggota masyarakat.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kajian dokumen. Penelitian ini disebut sebagai penelitian study literature, dengan cara menelaah jurnal, buku, laporan penelitian, majalah dan literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan dari berbagai sumber-sumber kemudian dikembangkan berdasarkan jenisnya, baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif untuk menjabarkan sumber-sumber data primer maupun sekunder guna membantu peneliti dalam memahami isi dari berbagai sumber yang ada. Pertama, melalui kajian kepustakaan yang sesuai dengan bahan yang diteliti. Kedua, setelah data diperoleh, maka penulis menganalisis data-data tersebut sesuai dengan pemahaman penulis dalam melakukan kajian ini.

PEMBAHASAN

Konsep kemiskinan dalam ekonomi islam

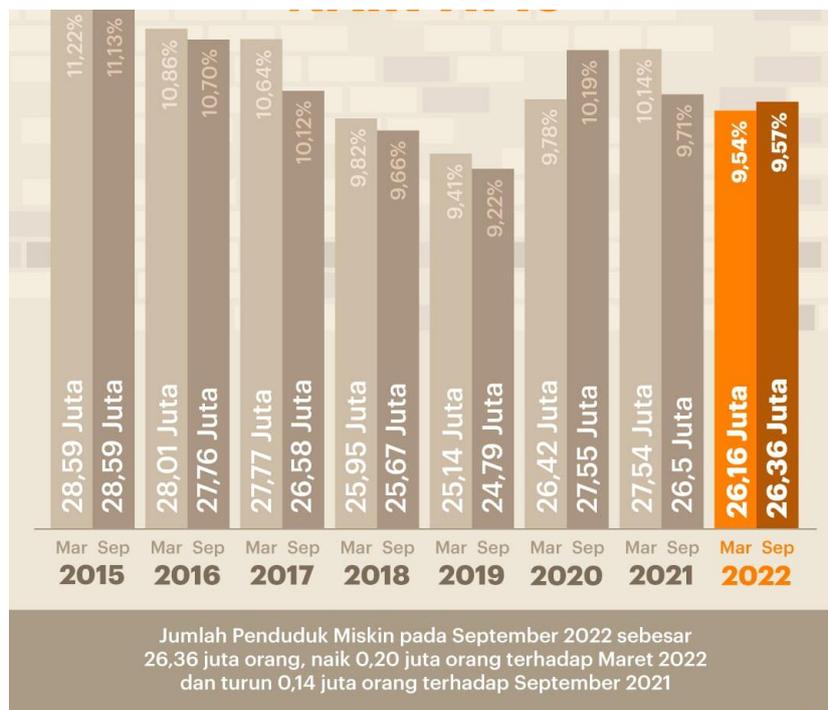
Dalam Ekonomi Syariah, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan². Definisi ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup yang layak. Ekonomi Syariah menekankan pentingnya keadilan distributif dan pemerataan kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Prinsip-prinsip seperti zakat, infaq, dan sedekah diimplementasikan untuk mendukung mereka yang kurang mampu, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya³.

Selain aspek materi, kemiskinan dalam Ekonomi Syariah juga mencakup dimensi non-materi, seperti akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan informasi. Kemiskinan bukan hanya masalah kekurangan uang, tetapi juga ketidakmampuan untuk mengakses sumber daya yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan individu. Oleh karena itu, upaya mengentaskan kemiskinan dalam

² Ahmad Suwandi, And Yenni Samri. "Peran Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan." *Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa)* 3.2 (2022): 15-30.

³ Muhammad Iqbal,. "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb* 5.2 (2017).

perspektif Syariah melibatkan pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, serta perbaikan sistem pelayanan publik. Melalui pendekatan ini, Ekonomi Syariah berupaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki peluang untuk berkembang dan hidup dengan bermartabat.



Dari grafik di atas terlihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan antara tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 27,55 juta orang. Namun, dalam kurun waktu satu tahun, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 26,36 juta orang pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan beberapa kebijakan pemerintah dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun tantangan dalam mengentaskan kemiskinan masih tetap ada.

Penurunan angka kemiskinan ini dapat diatribusikan kepada berbagai program sosial dan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 juga turut berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, untuk mencapai target yang lebih ambisius dalam pengentasan kemiskinan, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan, serta kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas.

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah yang Mendukung Pengentasan Kemiskinan **Prinsip keadilan**

Ekonomi Syariah menjunjung tinggi keadilan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap peluang ekonomi⁴. Hal ini diwujudkan melalui sistem zakat, sedekah, dan wakaf yang mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Dengan adanya mekanisme tersebut, ekonomi Syariah berusaha menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam masyarakat, memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan. Selain itu, distribusi kekayaan ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional.

Prinsip keadilan juga ditekankan dalam berbagai aspek muamalah ekonomi, seperti larangan riba, penipuan, dan monopoli⁵. Larangan riba mencegah eksploitasi melalui bunga yang berlebihan, sehingga pinjaman menjadi lebih adil dan terjangkau bagi semua pihak. Selain itu, larangan terhadap penipuan dan monopoli memastikan adanya transaksi yang jujur dan persaingan yang sehat dalam pasar. Dengan demikian, ekonomi Syariah berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang berlandaskan kejujuran dan keadilan, di mana hak-hak semua pelaku ekonomi dilindungi dan dihormati.

Keberpihakan kepada Orang Miskin (Fauqir dan Masakin)

Ekonomi Syariah menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar orang miskin dan meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini diwujudkan melalui kewajiban zakat, anjuran sedekah, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang memastikan bahwa sebagian harta orang kaya dialokasikan untuk mereka yang kurang mampu, sementara sedekah menjadi sarana untuk memberikan bantuan tambahan secara sukarela. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat dirancang untuk memberikan keterampilan dan peluang usaha bagi orang miskin, sehingga mereka dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara mandiri.

Prinsip keberpihakan kepada orang miskin juga tercermin dalam sistem mudarabah dan musyarakah yang memberikan peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan mendapatkan keuntungan yang adil. Dalam sistem mudarabah, orang miskin dapat menyediakan tenaga kerja atau keterampilan, sementara pihak lain menyediakan modal, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Musyarakah, di sisi lain, melibatkan kemitraan di mana kedua belah pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta risiko secara proporsional. Melalui mekanisme ini, ekonomi Syariah membuka akses bagi orang miskin untuk ikut serta dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan memperoleh penghasilan yang layak.

⁴ Abdullah Ahadish Shamad Muis, "Menyoal Keadilan Sosio-Ekonomi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Integrasi Analisis Konseptual Dan Praktikal." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2.2 (2022): 384-394.

⁵ Fahira Alimin, "Hukum Perdagangan Internasional Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah." *Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 1: 1-10.

Kerjasama dan Gotong Royong (Ta'awun)

Ekonomi Syariah mendorong semangat kerjasama dan gotong royong untuk membantu sesama yang membutuhkan. Hal ini diwujudkan melalui berbagai bentuk solidaritas sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, mewajibkan umat Muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian harta mereka bagi mereka yang kurang beruntung, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan sosial. Infak dan sedekah, meskipun bersifat sukarela, juga berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial dan memberikan dukungan tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui praktik-praktik ini, ekonomi Syariah membangun jaringan solidaritas yang kuat di mana setiap individu merasa bertanggung jawab untuk membantu sesama dan memastikan tidak ada yang terpinggirkan.

Prinsip kerjasama dan gotong royong juga ditekankan dalam konsep Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yang berfokus pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan syariah dan pendampingan usaha. BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang mengelola dana sosial dan komersial untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Melalui pembiayaan syariah, BMT memberikan modal usaha dengan sistem bagi hasil, yang lebih adil dan transparan dibandingkan sistem bunga dalam perbankan konvensional. Selain itu, BMT juga menyediakan pendampingan usaha, memberikan pelatihan dan konsultasi kepada para pelaku UMKM agar mereka dapat mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan. Dengan demikian, BMT berperan penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana usaha kecil dapat tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional

Keberkahan dan Keberlangsungan (Barakah dan Istimarah)

Ekonomi Syariah bertujuan untuk mencapai keberkahan dan keberlangsungan hidup bagi semua pihak⁶. Keberkahan, dalam konteks ini, merujuk pada manfaat yang berlipat ganda dan kebaikan yang berkelanjutan yang diperoleh dari praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini diwujudkan melalui berbagai instrumen syariah yang halal, adil, dan bermanfaat. Instrumen-instrumen tersebut termasuk transaksi tanpa riba, investasi dalam sektor yang tidak merugikan masyarakat, serta penerapan etika bisnis yang tinggi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, ekonomi dapat beroperasi dengan integritas dan kejujuran, menciptakan dampak positif jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Prinsip keberkahan dan keberlangsungan juga ditekankan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Dalam ekonomi Syariah, ada kesadaran yang mendalam akan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Hal ini tercermin dalam praktik bisnis yang menghindari eksploitasi berlebihan dan merusak alam. Pengelolaan sumber daya dilakukan dengan bijaksana untuk

⁶ Syahrul Amsari, Isnaini Harahap, And Zuhri M. Nawawi. "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah." *Ekonomis: Journal Of Economics And Business* 8.1 (2024): 729-738.

memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati manfaat yang sama. Pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan menjadi prioritas, di mana pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kesehatan ekosistem. Dengan demikian, ekonomi Syariah berupaya menciptakan harmoni antara pembangunan manusia dan pelestarian alam, memastikan bahwa keberkahan dapat dirasakan tidak hanya oleh generasi sekarang tetapi juga oleh generasi mendatang.

Penyebab Kemiskina Versi Islam

Fakta menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah masyarakat Indonesia, tetapi juga masalah mayoritas negara-negara dalam dunia Islam⁷. Menurut laporan Bank Dunia, dari hampir 6 miliar penduduk dunia, sebanyak 1,2 miliar yang hidup dengan pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari mayoritas adalah umat Islam. Mengapa kemiskinan terjadi lebih banyak di kalangan umat Islam? Apakah ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh negara-negara Islam dibandingkan dengan negara-negara maju? Berdasarkan realitas di lapangan, jawabannya tentu tidak. Ketidakmampuan umat Islam untuk mengeksplorasi SDA merupakan penyebab utama kemiskinan di kalangan mereka. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa definisi ekonomi konvensional yang menyatakan "ketersediaan SDA terbatas untuk memenuhi keperluan manusia yang tidak terbatas" tidak dapat diterima dalam Islam. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan SDA yang melimpah, baik yang berasal dari langit, darat, maupun lautan. Allah berfirman⁸:

1. Q.S Ibrahim : 32

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai

2. Q.S Ibrahim : 34

وَعَاتَلَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah,

⁷ Lukman Hakim, And Ahmad Danu Syaputra. "Al-Qur'an Dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.3 (2020): 629-644.

⁸ Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam." *Al-Falah: Journal Of Islamic Economics* 2.1 (2017): 81-99.

tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)

3. Q.S Al – Jatsiyah : 13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya : Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir

4. Q.S al araf : 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur

Semua ayat menunjukkan bahwa masalah sebenarnya bukan pada kelangkaan sumber daya alam (SDA), tetapi pada keterbatasan kemampuan manusia untuk mengeksploitasi SDA tersebut. Artinya, Islam tidak mengenal konsep kelangkaan SDA; yang ada hanyalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam mengeksplorasi SDA. Penyebab kemiskinan di dunia Islam umumnya sama dengan di Indonesia, seperti dualisme ekonomi, sistem keuangan dan pasar, serta diskriminasi regional. Beberapa ekonom juga berpendapat bahwa kemiskinan di Dunia Ketiga disebabkan oleh eksploitasi kolonial. Namun, klaim ini sering digunakan sebagai alasan untuk menutupi kegagalan kita sendiri dalam mensejahterakan umat, seperti yang terlihat pada kebangkitan Jepang setelah Perang Dunia II. Menurut Irfan Ul-Haq, ada delapan penyebab utama kemiskinan menurut al-Qur'an:

- a. Ketidaktaatan terhadap ajaran Ilahi, seperti memakan harta anak yatim (Q.S. al-Maun: 1-7;

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾

(1). Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama (2). Itulah orang yang menghardik anak yatim (3). dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (4). Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat (5). (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya (6). orang-orang yang berbuat riya (An-Nisa': 6). Yang menyebabkan kemiskinan berkelanjutan pada anak yatim akibat ketidakbertanggungjawaban penjaga mereka:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)

- b. Kemiskinan disebabkan oleh tindakan manusia sendiri, bukan karena kekurangan SDA⁹ (Q.S. as-Syura: 30; al-'Ankabut: 60; Taha: 118-119)
- c. Ketidakpedulian orang kaya terhadap orang miskin, seperti tidak membayar zakat (Q.S. al-Ma'arij: 18; at-Takatsur: 1; al-Munafiqun: 7; al-Haqq: 34)
- d. Banyak ayat mengancam orang kaya yang enggan membayar zakat, yang akan menghadapi kesulitan dan kesengsaraan (Q.S. al-Lail: 10-13; al-Humazah: 1-4).
- e. Diskriminasi alokasi hasil eksplorasi SDA oleh segolongan manusia terhadap golongan lain (Q.S. Ali Imran: 180; at-Taubah: 34; al-Anfal: 8 & 40; al-Hadid: 7). Harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola sesuai ketentuan agama.
- f. Sikap malas bekerja menyebabkan kemiskinan (Q.S. al-'Ashr: 1-3; al-Jum'ah: 10; al-Haqq: 34).

Strategi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan

Berulang-kalinya al-Qur'an menyebutkan masalah kemiskinan adalah merupakan suatu pertanda bahwa kemiskinan itu merupakan problema kehidupan yang sangat kompleks. Kompleksitas ini tidak hanya terletak pada dampak langsung kemiskinan terhadap individu yang mengalaminya, tetapi juga pada efek jangka panjang terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk memberantasnya haruslah mengadopsi pendekatan-pendekatan makro (komprehensif) dan holistik yang tidak saja menuntut partisipasi dan peran aktif golongan miskin, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas hidup.

⁹ Sharon Michelle O Pattiasina, "Pemberdayaan Kaum Miskin Sebagai Panggilan Gereja Terhadap Masalah Kemiskinan." *Bia': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4.1 (2021): 125-140.

Proposal strategi untuk memberantas kemiskinan di Indonesia harus mampu mengikis penyebab utama kemiskinan yang telah disebutkan di atas. Hal ini memerlukan komitmen dari berbagai pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi akar permasalahan kemiskinan. Pemerintah, misalnya, harus menciptakan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan akses pendidikan yang lebih baik, sementara masyarakat dapat berperan dengan memperkuat solidaritas sosial dan membantu sesama yang membutuhkan. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan menjadi usaha bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat demi tercapainya kesejahteraan yang merata.

Strategi Umum

Secara khusus, strategi Islam untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia melibatkan peran aktif individu, masyarakat, dan pemerintah¹⁰. Prioritas utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan dan martabat golongan miskin. Pembangunan harus menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang kurang mampu, dan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menekankan nilai-nilai akhlaqul karimah, tanpa diskriminasi dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan harus diberi kompensasi yang adil dan proporsional sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut A.M. Sadeq (1989), sewa tanah, upah tenaga kerja, keuntungan atas modal, dan upah kewirausahaan harus dibayar dengan proporsional, minimal mencukupi kebutuhan dasar mereka.

Pemerintah Indonesia harus memastikan ketersediaan barang dan jasa kebutuhan pokok di pasar mencukupi dan bebas dari monopoli. Kebijakan ekonomi yang diterapkan harus bersifat pragmatis, implementatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Pembangunan harus fokus pada infrastruktur dan sarana yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat miskin, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, irigasi, dan transportasi untuk meningkatkan produktivitas mereka. Pemerintah juga harus menyediakan pelatihan dan pendidikan gratis yang berorientasi kerja, khususnya bagi masyarakat tidak mampu, untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka agar dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan di masa depan.

Pemerintah juga harus menyediakan modal kerja bagi kaum dhuafa melalui sistem pinjaman bagi hasil (non-riba). Ini dapat dilakukan dengan menginstruksikan semua bank untuk mempermudah proses kredit berdasarkan sistem Syariah, seperti murabahah dan mudharabah, serta memastikan bank memiliki cabang di setiap daerah untuk memudahkan akses bagi masyarakat pedesaan. Dana pembangunan tidak boleh berasal dari pinjaman yang mengharuskan pembayaran bunga (riba). Pembangunan harus seimbang antara perkotaan dan pedesaan, dan pemerintah harus memastikan Upah Minimum Regional (UMR) di setiap daerah mencukupi

¹⁰ Ayief Fathurrahman, "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 13,1 (2012): 72-82.

kebutuhan dasar pekerja. Upah pekerja yang sudah berkeluarga harus dibedakan dengan upah pekerja lajang.

Pemerintah Indonesia harus bertindak jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab untuk memudahkan kerjasama masyarakat dalam mendukung pembangunan negara. Kerjasama berdasarkan amar ma'ruf nahi munkar diyakini akan mendapat dukungan penuh dari orang beriman, seperti disebutkan dalam Q.S. al-Maidah: 2. Pemerintah harus melihat rakyat sebagai aset potensial pembangunan dan bukan sebagai beban. Menurut Muhammad Akram Khan (1994), rakyat harus dilibatkan aktif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan untuk memberdayakan ekonomi mereka. Ini akan membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara bertahap, namun pasti dan menyeluruh. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap kebijakan ekonomi pemerintah adalah insentif berharga yang memotivasi mereka untuk memperbaiki nasib dan membangun ekonomi mereka sendiri, keluarga, dan negara secara umum.

Strategi Khusus

Secara khusus, strategi Islami untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia melibatkan peran aktif individu, masyarakat, dan pemerintah. Pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin, dengan membuka peluang kerja bagi mereka dan memastikan proses rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) berlandaskan nilai-nilai akhlaqul Karimah, bebas dari pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kompensasi yang adil dan Proporsional harus diberikan kepada faktor-faktor produksi seperti tanah, buruh, modal, dan kewirausahaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. A.M. Sadeq (1989) menyarankan agar sewa tanah, upah buruh, keuntungan modal, dan upah kewirausahaan dibayar secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka¹¹.

Pemerintah harus memastikan ketersediaan barang dan jasa kebutuhan pokok di pasar, bebas dari praktik monopoli, dan menjualnya dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat miskin. Pedagang yang menaikkan harga secara sepihak dan melakukan monopoli harus mendapat hukuman. Contoh tindakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaacob, yang mengawasi pasar dan menghukum pedagang nakal, bisa dijadikan teladan.

Pemerintah harus memberikan subsidi untuk masyarakat miskin, terutama subsidi modal usaha dan kebutuhan primer, serta terus menyediakan bantuan khusus seperti rumah murah dan fasilitas kesehatan. Bantuan harus merata, baik di kota maupun di desa. Pemerintah juga perlu menyediakan pinjaman modal kepada masyarakat miskin melalui lembaga keuangan, mendorong pinjaman tanpa bunga dalam bentuk Qard Hassan, dan membebaskan hutang yang tidak bisa dibayar dengan alasan yang logis.

¹¹ Fenna Rahma Nur Alya, Zahra Dilla, And Arizka Salsabila. "Peran Keagamaan Islam Dalam Mengurangi Kemiskinan Dan Meningkatkan Perekonomian." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1.6 (2023): 619-628.

Kebijakan fiskal harus rasional dengan penerapan pajak progresif dan pembebasan pajak bagi yang sudah membayar zakat untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Pembiayaan pembangunan harus selektif, hemat, transparan, dan efisien tanpa mengurangi kualitas dan prioritas pembangunan.

Dalam kebijakan moneter, pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi dengan inflasi rendah dan sistem perbankan Islami, menerapkan sistem bagi hasil. Pemerintah juga harus mereformasi institusi ekonomi dan politik secara bertahap, mempertahankan operasional bank syariah, takaful, ar-Rahn, dan Baitul Maal atau BAZIS. Institusi-institusi ini harus dioptimalkan, termasuk al-Hisbah untuk mengawasi pasar dan memastikan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar.

Pemerintah bisa mencontoh institusi Diwan pada masa Khalifah Umar bin Khattab untuk melakukan sensus dan menentukan gaji pensiun minimum bagi yang membutuhkan. Bantuan seperti tunjangan makanan dua kali sehari juga harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan primer.

Jika semua usaha ini belum mampu memberantas kemiskinan, barulah dana dari zakat, baik Zakat al-Mal maupun zakat fitrah, digunakan. Pemerintah harus mengoptimalkan fungsi zakat melalui Baitul Maal atau BAZIS dengan pengelolaan profesional dan amanah. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan harus diatasi melalui zakat dan musyawarah. Institusi Waqf dan hukum warisan juga harus dioptimalkan untuk memberantas kemiskinan.

KESIMPULAN

Dalam Ekonomi Syariah, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Pengentasan kemiskinan dalam Islam mencakup pendekatan holistik yang tidak hanya mengatasi kekurangan materi, tetapi juga meningkatkan akses terhadap layanan publik dan pendidikan.

Ekonomi Syariah mengedepankan keadilan distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah yang mendukung redistribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang kurang mampu. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam berbagai aspek muamalah, seperti larangan riba, penipuan, dan monopoli, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan.

Ekonomi Syariah juga menekankan pada pemberdayaan ekonomi bagi orang miskin melalui sistem mudarabah dan musyarakah, yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan memperoleh keuntungan yang adil. Prinsip kerjasama dan gotong royong (ta'awun) menggalakkan solidaritas sosial untuk membantu yang membutuhkan.

Dari data yang ada, terlihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia menurun dari 27,55 juta orang pada 2021 menjadi 26,36 juta orang pada 2022. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah dan program sosial-ekonomi. Namun, untuk pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan upaya yang intensif dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Islam juga menekankan bahwa kemiskinan seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah.

Penyebab utama kemiskinan dalam Islam mencakup ketidaktaatan pada ajaran Ilahi, ketidakpedulian terhadap pembayaran zakat, diskriminasi dalam alokasi hasil SDA, dan sikap malas bekerja.

Strategi Islam dalam mengentaskan kemiskinan melibatkan peran aktif individu, masyarakat, dan pemerintah. Pembangunan ekonomi harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses pendidikan, dan menyediakan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas hidup. Pemerintah harus memastikan ketersediaan barang dan jasa pokok di pasar, serta memberikan subsidi bagi masyarakat miskin. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, memastikan distribusi kekayaan yang adil, dan membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ahadish Shamad Muis, "Menyoal Keadilan Sosio-Ekonomi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Integrasi Analisis Konseptual Dan Praktikal." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2.2 (2022): 384-394.
- Ahmad Suwandi, And Yenni Samri. "Peran Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan." *Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa)* 3.2 (2022): 15-30.
- Ayief Fathurrahman, "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 13.1 (2012): 72-82.
- Diana Syahputri, Sofia Lubis, And Bunga Anggraini. "Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Kesejahteraan Di Negara-Negara Berkembang." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3.1 (2024): 93-103.
- Fahira Alimin, "Hukum Perdagangan Internasional Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah." *Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 1: 1-10.
- Fenna Rahma Nur Alya, Zahra Dilla, And Arizka Salsabila. "Peran Keagamaan Islam Dalam Mengurangi Kemiskinan Dan Meningkatkan Perekonomian." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1.6 (2023): 619-628.
- Lukman Hakim, And Ahmad Danu Syaputra. "Al-Qur'an Dan Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.3 (2020): 629-644.
- Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam." *Al-Falah: Journal Of Islamic Economics* 2.1 (2017): 81-99.
- Muhammad Iqbal, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb* 5.2 (2017).
- Mugni Muhit, Jajang Herawan, Hasan Bisri and Ija Suntana (2023) "Philosophical Transcendentalism of Sharia Economic Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 571-591. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.694.

- Muhamad Wildan. (2024). The Important Role of Aqşam in the Development of Islamic Economics. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.61166/rihlah.vii1.1>
- Sharon Michelle O Pattiasina, "Pemberdayaan Kaum Miskin Sebagai Panggilan Gereja Terhadap Masalah Kemiskinan." *Bia': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4.1 (2021): 125-140.
- Shabrina Fatimah Amini. (2023). Implementation of Micro Syari'ah People's Business Credit (KUR) Financing at Bank Syari'ah Indonesia KCP Cirebon Plered 1. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 1(1), 17–25. <https://doi.org/10.61166/fadilah.vii1.3>
- Syahrul Amsari, Isnaini Harahap, And Zuhrihal M. Nawawi. "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah." *Ekonomis: Journal Of Economics And Business* 8.1 (2024): 729-738.
- Tagor Indra Mulia Lubis, & Bagus Ramadi. (2023). Theoretical Studies Regarding Corruption, Corruption Crimes, and Perspective Studies on Islamic Criminal Law Theory (Fiqh Jinayah). *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(2), 84–96. <https://doi.org/10.61166/arfa.vii2.38>